

**ANALISIS KESENJANGAN KOMPETENSI
PRANATA KOMPUTER SEBAGAI
SUMBER DAYA MANUSIA
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL**



TESIS

Karya Tulis ini sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Manajemen

Disusun Oleh

Endirah Ekaningrum, S.Kom
22232536

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMIKA dan BISNIS
UNIVERSITAS BPD
2025**

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sangat cepat menjadi pendorong utama dalam transformasi digital, termasuk dalam sektor pemerintahan. Kekuatan dan kecepatan yang luar biasa dari digitalisasi telah menjadi bagian dan mengambil alih hidup kita, tapi sayangnya belum semua pemerintah daerah dapat beradaptasi dengan kondisi ini. Alasan utama dan terpenting untuk keadaan ini dalam organisasi adalah kurangnya aparatur pemerintah daerah terlatih, yang memungkinkan mereka memahami cara mengatasi perubahan ini (Setyasih, 2022). Pemerintah daerah dituntut untuk menerapkan layanan berbasis digital guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan publik. Hal tersebut sejalan dengan agenda strategis nasional yaitu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pada tanggal 24 April 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dimana perencanaan SDM TIK sewajarnya dilakukan melalui identifikasi kebutuhan SDM sesuai target arsitektur SPBE dengan memperhatikan kompetensi SDM TIK yang berpedoman pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), pemetaan profesi SDM SPBE, dan kebutuhan jumlah personel SDM untuk setiap profesi SDM SPBE.

Kurangnya sumber daya manusia dengan kompetensi tertentu dalam sebuah organisasi memang sudah menjadi permasalahan yang umum termasuk dalam organisasi pemerintah daerah. Penelitian-penelitian terkait Analisis Kompetensi SDM yang telah dilakukan menyebutkan bahwa, Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi (SDM TIK) di era transformasi digital masih sedikit dan kesenjangan tenaga kerja berketerampilan digital di Indonesia hanya mendapat sedikit perhatian dari para peneliti (Gayatri et al., 2023).

Sebenarnya pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil merupakan salah satu fokus pemerintah dalam RPJP 2005- 2024 (Cahyarini & Samsara, 2021). Pengembangan kompetensi tersebut agar sektor pemerintahan dapat memiliki pegawai dengan kompetensi yang unggul. Lantas sebenarnya apa saja kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang SDM TIK untuk mendukung implementasi SPBE di lingkungan pemerintah daerah? Bagaimana kondisi SDM TIK di lingkungan pemerintah Kabupaten Tegal di era SPBE ini? Bagaimana kesenjangan kompetensi SDM TIK ini bisa terjadi? Serta Solusi apa yang kiranya bisa diusulkan untuk menghilangkan atau meminimalisir kesenjangan kompetensi SDM TIK yang ada?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dibutuhkan penelitian lebih mendalam untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kesenjangan kompetensi yang ada, faktor-faktor penyebabnya, serta dampaknya terhadap kinerja organisasi. Oleh karena itu topik ini menjadi penting karena dapat memberikan dasar ilmiah untuk memahami dan mengatasi kesenjangan kompetensi SDM TIK yang menjadi hambatan transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tegal.

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengidentifikasi dan memahami permasalahan kesenjangan kompetensi SDM TIK di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. Data dan informasi yang dihasilkan diharapkan menjadi dasar yang kuat dalam perumusan kebijakan pengelolaan dan pengembangan SDM TIK yang lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan guna mendukung agenda transformasi digital serta implementasi SPBE.

Lebih dari itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan strategis dalam menyusun langkah-langkah peningkatan kapasitas SDM, baik melalui pelatihan, sertifikasi, maupun penempatan SDM yang sesuai dengan kompetensinya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat secara praktis bagi Pemerintah Kabupaten Tegal, tetapi juga memberikan kontribusi akademik dan kebijakan yang relevan bagi penguatan tata kelola TIK di sektor pemerintahan secara umum.

Peneliti berharap bahwa hasil kajian ini dapat mendorong penguatan komitmen lintas sektor dalam mengoptimalkan potensi SDM TIK sebagai pilar utama dalam mendukung transformasi birokrasi digital yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah untuk menentukan fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk kesenjangan kompetensi SDM TIK yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal?
2. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kesenjangan kompetensi SDM TIK?
3. Bagaimana dampak kesenjangan kompetensi SDM TIK terhadap implementasi SPBE di Kabupaten Tegal?
4. Solusi apa yang dapat diusulkan untuk mengatasi kesenjangan kompetensi SDM TIK di Kabupaten Tegal?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang merupakan arah atau sasaran akhir pada suatu penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi bentuk-bentuk kesenjangan kompetensi SDM TIK di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.
2. Menganalisis faktor-faktor penyebab kesenjangan kompetensi SDM TIK di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.
3. Mengevaluasi dampak kesenjangan kompetensi tersebut terhadap implementasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.
4. Memberikan alternatif Solusi untuk mengatasi kesenjangan kompetensi SDM TIK di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini bisa memperkaya literatur tentang kesenjangan kompetensi SDM di bidang teknologi informasi, khususnya dalam konteks birokrasi pemerintahan daerah. Penelitian ini juga bisa menjadi referensi untuk studi-studi selanjutnya yang membahas pengembangan kompetensi digital di sektor publik.

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan gambaran konkret kepada Pemerintah Kabupaten Tegal mengenai kondisi aktual kompetensi SDM TIK yang ada, sekaligus mengidentifikasi area kompetensi yang belum terpenuhi berdasarkan kebutuhan kerja. Temuan ini dapat menjadi dasar perencanaan pelatihan, rekrutmen, atau pengembangan strategi peningkatan kapasitas pegawai bidang TIK

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada analisis kesenjangan antara kompetensi aktual dengan kompetensi yang dibutuhkan pada ASN dengan jabatan Pranata Komputer yang berperan

dalam bidang teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. Lingkup kompetensi yang dianalisis adalah kompetensi teknis, yaitu pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skills).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu pegawai yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap pengelolaan atau dukungan sistem teknologi informasi, baik yang bekerja di Dinas Komunikasi dan Informatika maupun perangkat daerah lain yang menjalankan fungsi TIK. Penelitian ini tidak membahas aspek manajemen organisasi secara keseluruhan atau infrastruktur teknis TIK, tetapi lebih kepada profil kompetensinya.

Profil kompetensi yang dianalisis adalah kondisi sampai dengan akhir tahun 2024 dengan di dasarkan pada pengalaman dan masa kerja minimal SDM TIK Pranata Komputer yang bekerja pada OPD tersebut..

1.6 Sitematika Penulisan

Tesis ini disusun dalam lima bab utama dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Membahas konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan kompetensi SDM, teknologi informasi di sektor publik, kesenjangan kompetensi, serta kajian pustaka dan penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III Metodologi Penelitian

Berisi penjelasan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu, populasi dan sampel (atau informan), teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menampilkan hasil dari proses pengumpulan dan analisis data, serta pembahasan mengenai temuan kesenjangan kompetensi SDM TIK yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Berisi ringkasan temuan utama, saran untuk pengembangan SDM TIK di lingkungan pemerintahan, serta saran untuk penelitian selanjutnya.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi

Menurut Prof. Dr. Edy Sutrisno, M.Si dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia, sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya (rasio, rasa dan karsa). Semua potensi SDM tersebut berpengaruh dalam upaya organisasi mencapai tujuan. Betapapun majunya teknologi, perkembangan informasi, tersedianya modal dan memadainya bahan, jika tanpa SDM sulit bagi organisasi tersebut mencapai tujuannya.

Werther dan Davis (1996) dalam (Sutrisno, 2021) menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah “pegawai yang siap, mampu dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi”. Sebagaimana dikemukakan bahwa dimensi pokok isi sumber daya adalah kontribusinya terhadap organisasi, sedangkan dimensi pokok manusia adalah perlakuan kontribusi terhadapnya yang pada gilirannya akan menentukan kualitas dan kapabilitas hidupnya.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor sentral dalam perkembangan suatu organisasi. SDM menjadi penggerak roda organisasi dalam mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Karena

itu, produktivitas organisasi sangat ditentukan oleh produktivitas SDM nya dan produktivitas SDM sangat ditentukan oleh kompetensi yang dimilikinya. Dalam konteks implementasi SPBE produktivitas organisasi tak bisa dipungkiri sangat dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi (SDM TIK).

SDM TIK (Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi) secara umum merujuk pada individu atau kelompok tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, yang mencakup pengelolaan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, data, dan layanan digital.

Dalam lingkup pemerintahan, SDM TIK merujuk pada aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki tanggung jawab terhadap pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Adapun jabatan-jabatan yang terkait SPBE dapat berupa jabatan fungsional maupun jabatan pelaksana yang erat kaitannya dengan tata kelola TIK diantaranya Pranata Komputer, Sandiman, Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi, Pemeriksa Forensik Digital, dsb.

Adapun SDM TIK yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ASN dengan jabatan fungsional Pranata Komputer karena secara aktual di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal SDM TIK yang bertanggungjawab terhadap tata Kelola TIK adalah para pejabat fungsional pranata komputer baik dari jenjang terampil maupun jenjang ahli.

Hal ini juga selaras dengan definisi Jabatan Fungsional Pranata Komputer yang tertuang dalam Permen PAN RB Nomor 32 Tahun 2024 bahwa Jabatan Fungsional Pranata Komputer adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer. Pejabat Fungsional Pranata Komputer yang selanjutnya disebut Pranata Komputer adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer.

2.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi

Menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negeri Nomor: 46A Tahun 2005 dalam (2006, hlm.47) tentang pengertian Kompetensi adalah : Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya profesional, efektif dan efisien (Andalangi et al., 2022).

Kompetensi menunjukkan profesionalisme yang dibentuk dari keterampilan ataupun pengetahuan yang seseorang miliki di bidang tertentu sebagai hal yang terpenting dan keunggulan bidang tersebut. Kompetensi sebagai kecakapan seseorang untuk menyalurkan dan mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan di situasi baru dan meningkatkan kebermanfaatan yang disepakati akan menghasilkan sesuatu pada tingkat yang memuaskan di tempat kerja. (Rachmanto & Kusbandrijo, 2023)

Kompetensi meliputi sekumpulan pengetahuan, keterampilan, sifat, dan perilaku yang bisa bersifat teknis, berkaitan dengan keterampilan antar pribadi, atau berorientasi bisnis. Menurut Sutrisno & Zuhri (2019) mendefinisikan kompetensi sebagai suatu kemampuan yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan yang didukung oleh sikap kerja serta penerapannya dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan di tempat kerja yang mengacu pada persyaratan kerja yang ditetapkan. (Rita, 2023)

Sehingga kompetensi dapat disimpulkan sebagai kemampuan seseorang yang mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan organisasi. Sedangkan

Standar Kompetensi adalah perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.

Adapun kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam implementasi SPBE meliputi kompetensi di bidang:

- a. Proses bisnis pemerintahan;
- b. Arsitektur SPBE;
- c. Data dan informasi SPBE;
- d. Keamanan SPBE;
- e. Aplikasi SPBE; dan
- f. Infrastruktur SPBE.

Sedangkan standar kompetensi jabatan fungsional pranata komputer meliputi kompetensi manajerial, sosio kultural dan teknis (Pemerintah Indonesia, 2020). Sesuai ruang lingkup penelitian maka kompetensi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kompetensi teknis jabatan fungsional pranata komputer sebagai SDM TIK dalam implementasi SPBE pada pemerintah daerah kabupaten Tegal yang terdiri atas:

- a. Information technology enterprise;
- b. Manajemen layanan teknologi informasi;
- c. Pengelolaan data;
- d. Manajemen risiko teknologi informasi;
- e. Infrastruktur teknologi informasi; dan
- f. Sistem informasi dan multimedia.

Selanjutnya dalam penerapannya, standar kompetensi SDM TIK tersebut kemudian dipetakan ke dalam. Peta Profesi SDM SPBE Kabupaten Tegal yang menjadi bagian lampiran Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2024 yang mana nama-nama profesi tersebut diambil berdasarkan peta Profesi Bidang Teknologi Informasi Kementrian Kominfo Tahun 2018 dan Perubahannya Tahun 2022

Tabel 1:Peta Profesi SDM SPBE Kabupaten Tegal

Sumber:Perbub Nomor 9 Tahun 2024

No	Tata Kelola TI	Sistem ManajemenData	Pengembangan Aplikasi	Infrastruktur Jaringan dan Server	Manajemen Pusat Data	Keamanan Informasi	Manajemen Layanan TI
1	Chief Information Officer	Data Scientist	Manajer Pengembangan Aplikasi	Network Administrator Utama	Manajer Pusat Data	IT Auditor	IT Service Manager
2	Enterprise Architect	Data Analyst	System Analyst	Network Administrator	Teknisi Pusat Data	Cyber Security Manager	Help Desk Technician
3		Database Administrator	Senior Programmer	System Administrator		Cyber Security Engineer	Staf Operasi Layanan TI
4		Data Engineer	Pengembangan web Pemrogram Mobile	Technical Support		Operation Center Specialist	
5		Data Entry Operator	Software quality control tester	Operator Komputer		IT Security Management Staff	

Dijelaskan lebih lanjut bahwa setiap profesi tersebut tidak harus melekat pada seorang personel/jabatan, sehingga seorang personel/jabatan dapat memiliki beberapa tanggung jawab, fungsi dan kompetensi sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditugaskan. Walaupun

demikian, berdasarkan cakupan tanggung jawab penerapan SPBE yang harus diselenggarakan oleh seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Tegal, maka setiap profesi idealnya dibebankan minimal pada seorang personel/jabatan yang tercantum pada pemetaan kebutuhan dari setiap profesi SDM SPBE. Sehingga beban pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

2.3 Kesenjangan Kompetensi

Seperti kita ketahui bersama bahwa kesenjangan kompetensi terjadi ketika kemampuan aktual individu atau kelompok tidak sesuai dengan standar kompetensi organisasi. Dalam beberapa penelitian menyampaikan bahwa kesenjangan kompetensi dapat diukur melalui analisis perbedaan antara kompetensi yang dimiliki dengan kompetensi ideal yang diperlukan, yang menjadikan validasi selisih kompetensi sebagai langkah awal strategis dalam pengembangan SDM.

Nyatanya perubahan teknologi yang cepat sering tidak diikuti pengembangan kapasitas SDM secara proporsional, sehingga hal tersebut membuat kesenjangan semakin melebar. Dalam konteks pemerintahan daerah, hal ini berdampak langsung pada efektivitas layanan publik dan keberhasilan program digitalisasi termasuk implementasi SPBE.

Tambahan dari perspektif manajemen kompetensi, Ramelan dan kolega dalam buku *Competency Management: Teknik Mengimplementasikan Manajemen SDM Berbasis Kompetensi untuk Meningkatkan Daya Saing Organisasi* (2007) menyatakan bahwa manajemen kompetensi yang efektif mencakup:

- a. Penyusunan standar kompetensi jabatan;
- b. Asesmen gap kompetensi aktual versus standar;
- c. Penyusunan rencana pengembangan; dan
- d. Monitoring serta evaluasi pelaksanaan kompetensi

Proses ini mencerminkan pendekatan sistematis dalam pengidentifikasian kesenjangan kompetensi dan formulasi intervensi berbasis kebutuhan.

Sementara itu, dalam diktat pengembangan kompetensi ASN oleh Kementerian PAN-RB, disebutkan bahwa kegiatan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) menjadi tahap krusial dalam memetakan kesenjangan kompetensi dan menyusun rencana diklat yang tepat sasaran. Dokumen ini menggarisbawahi bahwa kesenjangan kompetensi yang tidak segera diatasi dapat menghambat pelaksanaan fungsi jabatan dan pencapaian target pembangunan daerah

Dari beragam literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan kompetensi bukan sekadar ketidaksesuaian teknis semata, melainkan fenomena sistemik yang memerlukan pendekatan manajerial dan kebijakan SDM berbasis analisis kebutuhan dan standar jabatan. Oleh sebab itu, identifikasi dan analisis kesenjangan kompetensi menjadi krusial sebagai landasan untuk merumuskan strategi pengembangan SDM yang relevan, mencakup penyusunan kamus kompetensi, pelatihan berbasis gap, sertifikasi, dan penempatan orang sesuai kompetensinya. Langkah yang sangat penting dalam upaya merealisasikan birokrasi digital di lingkungan pemerintahan daerah.

Saat ini terjadi kesenjangan antara standar kompetensi jabatan fungsional ASN terkait dengan TIK seperti Jabatan Fungsional Pranata Komputer dengan standar kompetensi yang ditetapkan dalam Daftar Unit Kompetensi Okupasi TIK. Hal ini mengakibatkan pegawai ASN pada jabatan fungsional tersebut belum memiliki standar kompetensi teknis TIK yang memadai (Pemerintah Indonesia, 2018)

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berangkat dari konsep dasar kesenjangan kompetensi, yakni ketidaksesuaian antara kompetensi aktual pegawai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan oleh organisasi. Kesenjangan ini menjadi titik tolak untuk memahami permasalahan dalam pengelolaan SDM, khususnya dalam konteks digitalisasi birokrasi dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di tingkat daerah.

Dalam pendekatan Spencer & Spencer, kompetensi tidak semata dilihat dari aspek administratif, melainkan sebagai karakteristik mendalam dari individu yang terkait erat dengan **performa kerja unggul**. Pendekatan ini sangat relevan dengan konteks ASN di pemerintahan, karena menekankan integrasi antara kecakapan teknis dan kesiapan perilaku (behavioral readiness).

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap persepsi dan pengalaman para partisipan dalam organisasi. Melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, analisis dilakukan dengan membandingkan pedoman manajemen SDM SPBE terkait kebutuhan kompetensi jabatan dengan kondisi aktual kompetensi SDM TIK.

Dalam kerangka pemikiran ini, kesenjangan yang muncul tidak hanya dipahami secara kuantitatif (seberapa besar selisih), tetapi juga dianalisis secara tematis dan kontekstual, untuk memahami faktor-faktor penyebab, dampak, serta potensi intervensi yang dapat dilakukan oleh organisasi.

Lebih lanjut, kerangka ini juga mempertimbangkan teori manajemen strategis SDM yang menekankan pentingnya *aligning people with strategy* di mana kompetensi individu harus sejalan dengan arah dan kebutuhan organisasi, terutama dalam menghadapi tantangan transformasi digital. Oleh karena itu, hasil temuan dari penelitian ini diharapkan tidak hanya menggambarkan kesenjangan, tetapi juga menjadi masukan dalam penyusunan strategi pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan nyata.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Tito Rachmanto dan Bambang Kusbandrijo (2023) yang berjudul “Analisis Kompetensi Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Surabaya” menyimpulkan SDM yang memiliki kompetensi TIK merupakan salah satu pondasi yang harus terbangun di era SPBE. Selain itu pengembangan SDM TIK perlu dijadwalkan secara rutin dalam kerangka acuan kerja dan dianggarkan dalam suatu dokumen perencanaan anggaran pada Dinas Kominfo dan BKPSDM.

Sementara itu Endang Try Setyasih dalam penelitiannya “Transformasi Digital Pemerintah Daerah Di era Society 5.0 Studi kasus Provinsi Jawa Barat” menyatakan transformasi digital pada pemerintahan daerah di Indonesia relatif masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain terutama di kawasan Asia Tenggara. Hal ini disebabkan beberapa faktor penghambat yaitu belum ada standarisasi terkait implementasi, SDM yang kurang memadai, infrastruktur masih belum merata, kurang keterlibatan Masyarakat dan kurang komitmen pemerintah.

Namun hingga saat ini belum ada penelitian secara khusus yang meneliti terkait SDM TIK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Hal tersebut memperkuat urgensi perlunya penelitian tentang kesenjangan kompetensi SDM TIK dengan harapan dapat dijadikan

referensi dalam pemetaan kesenjangan kompetensi secara berkala agar organisasi dapat merancang intervensi pengembangan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan.

3. Metodologi Penelitian

3.1 Pendekatan Penelitian

Analisis kesenjangan kompetensi SDM TIK memiliki karakteristik permasalahan yang kompleks dan kontekstual. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor organisasional, budaya kerja, kebijakan pelatihan, serta pengalaman dan persepsi individual para pemangku kepentingan oleh karena itu pada penelitian ini digunakan metode kualitatif. Tujuannya adalah untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam fenomena kesenjangan kompetensi SDM TIK yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, berdasarkan pengalaman, pandangan, dan interaksi para pelaku di dalamnya.

Metode kualitatif paling cocok digunakan untuk mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh melalui lapangan. Dengan metode kualitatif peneliti pada tahap awalnya melakukan penjelajahan, selanjutnya melakukan pengumpulan data yang mendalam sehingga dapat ditemukan hipotesis yang berupa hubungan antar gejala. Hipotesis tersebut selanjutnya diverifikasi dengan pengumpulan data yang lebih mendalam. Bila hipotesis terbukti, maka akan menjadi tesis atau teori (Sugiyono, 2020).

Metode kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk memahami realitas dari sudut pandang partisipan melalui proses wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen kebijakan yang relevan. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif, yakni untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kesenjangan kompetensi, memahami faktor-faktor penyebabnya, serta mengevaluasi dampaknya terhadap implementasi program digitalisasi daerah. Penelitian ini juga bertujuan mengungkap isu-isu tersembunyi yang mungkin belum banyak terungkap dalam penelitian sebelumnya, yang menjadikan pendekatan kualitatif sebagai bagian penting dari desain penelitian ini.

Menurut Bogdan & Biklen penelitian kualitatif baru dikenal dan digunakan pada sekitar tahun 1960-an, istilah kualitatif ini digunakan untuk mengakomodir penelitian dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Data berupa data verbal
2. Kaya akan paparan
3. Data tidak dapat diolah dengan statistik
4. Masalah penelitian tidak dioperasionalkan dengan variable
5. Tidak menguji hipotesis
6. Memahami perilaku suatu objek
7. Tidak ada perlakuan terhadap data
8. Pengumpulan data langsung di lapangan
9. Biasanya memerlukan waktu lebih lama

Prof. Sugiyono dalam bukunya Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D menyebutkan dalam mempertajam penelitian kualitatif Spradley menyatakan bahwa "*A focused refer to a single cultural domain or a few related domains*" maksudnya adalah bahwa, fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Kebaruan yang dimaksud disini adalah bisa berupa upaya untuk memahami secara lebih luas dan mendalam tentang situasi sosial, tetapi juga ada keinginan untuk menghasilkan hipotesis atau ilmu baru dari situasi sosial yang diteliti.

Fokus dalam penelitian ini diperoleh setelah peneliti melakukan *grand tour observation* dan *grand tour question* atau yang disebut dengan penjelajahan umum yang dilakukan pada beberapa perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Dari penjelajahan umum ini peneliti memperoleh gambaran umum menyeluruh yang masih pada tahap permukaan tentang situasi sosial yang akan diteliti. Untuk dapat memahami secara lebih luas dan mendalam, maka diperlukan pemilihan fokus penelitian.

Spradley dalam Sanapiah Faisal (1988) mengemukakan empat alternatif untuk menetapkan fokus yaitu:

1. Menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan
2. Menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu organizing domain
3. Menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek
4. Menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori- teori yang telah ada

Berdasarkan saran informan dan minimnya studi terdahulu yang secara spesifik menyoroti kesenjangan kompetensi SDM TIK di tingkat pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Tegal, memperkuat urgensi penggunaan pendekatan kualitatif. Dengan demikian, metode ini tidak hanya mampu menjawab pertanyaan penelitian, tetapi juga memberikan kontribusi ilmiah untuk mengisi kekosongan literatur dan menjadi dasar pengembangan kebijakan yang lebih kontekstual dan aplikatif di masa depan.

Adapun catatan penting yang patut diperhatikan dalam sebuah penelitian kualitatif adalah terkait judul penelitian. Karena masalah yang dibawa dalam usul penelitian masih bersifat sementara dan holistic maka judul yang dirumuskan dalam proposal masih bersifat sementara. Judul laporan penelitian kualitatif yang baik justru akan berubah setelah peneliti memasuki lapangan. Oleh karena itu dalam laporan penelitian ini judul penelitian berubah menjadi **Kesenjangan Kompetensi Pranata Komputer Sebagai Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.**

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dengan melibatkan beberapa Perangkat Daerah yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berlokasi di Jl. Dr. Soetomo No.1 Slawi.

Penelitian ini melibatkan Pejabat Fungsional Pranata Komputer pada Dinas Kominfo khususnya pada Bidang SPBE sebagai informan utama dan juga beberapa Pejabat Pranata Komputer yang ada di beberapa Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Adapun waktu penelitian dilakukan selama tiga bulan sejak RUP disetujui sedangkan observasi langsung sudah dilakukan sejak sebelum pengajuan usulan RUP untuk lebih mendalami situasi dan fenomena yang akan diteliti.

3.3 Partisipan

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu karena orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita teliti. Pada penelitian ini peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Penentuan sumber data atau partisipan yang diwawancarai dipilih dengan pertimbangan, kriteria dan tujuan tertentu, yaitu terdiri dari:

1. Pranata komputer sebagai SDM TIK yang ada di tiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Pranata Komputer yang kami jadikan partisipan adalah Pejabat Fungsional Pranata Komputer dengan masa kerja minimal satu tahun pada perangkat daerah tersebut terhitung hingga akhir tahun 2024. Dari rekan-rekan Pranata Komputer peneliti akan menggali pengalaman selama menjadi SDM TIK di OPD untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kesenjangan kompetensi serta penyebabnya secara lebih spesifik yang dirasakan selama ini. Tidak menutup kemungkinan dari mereka juga bisa muncul saran-saran untuk pengembangan kompetensi kedepannya.
2. Bidang SPBE pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal yang merupakan stakeholder utama terkait tata Kelola TIK atau implementasi SPBE di Kabupaten Tegal. Peneliti ingin memperoleh gambaran umum terkait implementasi SPBE sejauh ini, menggali informasi terkait kebutuhan kompetensi serta kesenjangan kompetensi SDM TIK secara keseluruhan dikaitkan dengan implementasi SPBE.
3. Bidang Pengembangan SDM Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tegal yang merupakan stakeholder utama terkait pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN untuk menggali solusi terkait kesenjangan kompetensi SDM TIK yang mungkin dilakukan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian Deskriptif Eksploratif ini menggunakan Teknik Triangulasi. Teknik Triangulasi merupakan proses pengumpulan data yang mengkombinasikan beragam teknik pengumpulan data dan sumber data yang ditentukan. Untuk menyamakan tahapan dan tipe data yang dibutuhkan, maka proses pengumpulan data dibagi menjadi Data Primer dan Sekunder. (Sugiyono, 2020).

Untuk data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi kedalam data primer dan sekunder. Data Primer memiliki tahap pengumpulan data berupa observasi dan wawancara mendalam (*in-depth interviews*). Pada tahap observasi peneliti terjun langsung ke lapangan yang berlokasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data yang valid dan akurat sesuai kondisi realitas yang diamati peneliti. Kemudian wawancara mendalam yang dilakukan peneliti untuk memperoleh informasi secara lengkap, mendalam, dan komprehensif, serta mencari topik permasalahan yang diangkat dan berkaitan dengan lingkungan sekitar tempat penelitian.

Data Sekunder merupakan data tambahan yang diperlukan menggunakan teknik dokumentasi. Pendokumentasian selama penelitian berlangsung sangat diperlukan untuk memvalidasi penelitian bahwa penelitian tersebut telah dilakukan berdasarkan dokumentasi terbaru, sedangkan visualisasi akan memberikan gambaran nyata tentang keadaan sebenarnya. Data sekunder juga digunakan sebagai pelengkap dalam perluasan pembahasan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. **Wawancara Mendalam**
Dalam penelitian ini dilakukan wawancara semi terstruktur atau *in depth interview* di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat, dan ide-idenya. Dalam hal ini untuk mendapatkan data mengenai pengalaman, kesenjangan, dan kebutuhan terkait kompetensi SDM TIK.
2. **Observasi**

Dengan observasi di lapangan peneliti jadi lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan dapat diperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh dengan mengobservasi tiga komponen yaitu *place* (tempat), *actor* (pelaku), dan *activities* (aktivitas). Dalam penelitian ini peneliti mengamati langsung aktivitas dan pola kerja SDM TIK di beberapa OPD. Spradley, dalam Susan Stainback (1988) membagi observasi berpartisipasi menjadi empat, yaitu *pasive participation*, *moderate participation*, *active participation*, dan *complete participation*.

3. Analisis Dokumen

Analisis dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti menelaah dokumen kebijakan, laporan evaluasi, serta program pelatihan yang terkait dengan pengelolaan SDM TIK di Kabupaten Tegal diantaranya:

Perbub Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Manajemen SDM SPBE,

3.5 Teknik Analisis Data

Melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang samaa bisa diklasifikasikan lain oleh peneliti yang berbeda (Sugiyono, 2020)

Tujuan dari Analisis data adalah untuk menghasilkan data yang lebih teratur dan terstruktur agar dapat memiliki makna informasi baru. Berdasarkan prosesnya, analisis juga dapat didefinisikan sebagai penyederhanaan bentuk data menjadi data yang lebih mudah dipahami dan diterjemahkan agar bisa diterapkan.

Analisis data dalam penelitian kualitatif bisa dimulai sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Analisis juga bisa dilakukan ketika data telah terkumpul hampir sempurna, namun juga bukan hal yang mustahil jika terdapat data tambahan selama proses analisis berlangsung. Ketika data sudah berhasil dikumpulkan maka peneliti akan memilah dan mengelompokkan data yang valid dan sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian data yang telah dikelompokkan tersebut dijelaskan secara rinci dan dianalisis hingga menghasilkan jawaban atas permasalahan yang menjadi sebab dilakukannya penelitian

Miles and Huberman menyebutkan langkah-langkah tahapan analisis dalam penjabaran berikut:

- a. **Reduksi Data**, peneliti akan mengumpulkan sebanyak mungkin data yang digunakan sebagai sumber penelitian menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi dari objek penelitian.
- b. **Display Data** atau Penyajian Data, perolehan data melalui proses pengamatan dan observasi berupa daftar klasifikasi data yang disajikan dalam bentuk tabel atau matriks, dan bagan maupun narasi yang berisi deskripsi data yang didapatkan.
- c. **Kesimpulan**, bagian dari reduksi data, dan display data dengan melakukan analisis lanjutan sehingga kesimpulan dapat diambil sesuai data atau fakta penelitian.

Adapun Spradley (1980) membagi analisis data dalam penelitian kualitatif berdasarkan beberapa tahapan:

- a. **Analisis Domain**, merupakan Langkah pertama dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek penelitian. Makin banyak domain yang dipilih maka akan makin banyak waktu yang diperlukan.
- b. **Analisis Taksonomi**, yaitu menjabarkan domain yang dipilih menjadi lebih rinci, dilakukan dengan observasi terfokus.

- c. **Analisis Komponensial**, mencari ciri spesifik dengan melakukan observasi dan wawancara terseleksi
- d. **Analisis Tema Kultural**, untuk mencari hubungan di antara domain, dan bagaimana hubungannya dengan keseluruhan, dan selanjutnya dinyatakan ke dalam tema/ judul penelitian

Teknik analisis data yang diberikan oleh Miles and Huberman dan Spradley saling melengkapi. Dalam setiap tahapan penelitian Miles and Huberman menggunakan langkah-langkah data reduksi, data display, dan verification. Ketiga langkah tersebut dapat dilakukan pada semua tahap dalam proses penelitian kualitatif, yaitu tahap deskripsi, fokus, dan seleksi.

Sedangkan langkah-langkah analisis tematik Braun & Clarke adalah:

- a. **Familiarisasi Data**: Memahami isi data secara mendalam dengan membaca ulang transkrip wawancara, catatan observasi, atau dokumen yang dikumpulkan.
- b. **Open Coding**: Mengidentifikasi tema-tema awal dari data wawancara, observasi, dan dokumen.
- c. **Axial Coding**: Menghubungkan tema-tema yang muncul untuk menemukan kategori yang lebih besar.
- d. **Meninjau dan Memperbaiki Tema**: Memastikan bahwa tema yang ditemukan benar-benar mewakili data yang dikumpulkan.
- e. **Menamai dan Mendefinisikan Tema**: Memberikan nama yang jelas untuk setiap tema agar dapat menjelaskan inti permasalahan yang ditemukan.
- f. **Menyusun Hasil Laporan Analisis**: Menyajikan hasil analisis dalam bentuk narasi yang menjelaskan temuan penelitian berdasarkan data.

Analisis tematik ini sangat tepat dilakukan apabila sebuah penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi apa yang sesungguhnya terjadi dalam sebuah fenomena serta menganalisa data-data kualitatif, misalnya data yang diperoleh dari wawancara mendalam atau *semi-structured interview* (Heriyanto, 2018)

3.6 Alat Bantu Analisis

Dalam penelitian kualitatif ada beberapa masalah yang biasanya dihadapi peneliti, diantaranya:

- 1. Terkait pengumpulan data karena biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama
- 2. Penarikan sampel karena tidak dapat dipungkiri terkadang kata-kata memiliki makna terselubung
- 3. Bagaimana menghindari bias sewaktu pengumpulan data

Namun permasalahan tersebut kini dapat diatasi dengan penggunaan aplikasi yang dikembangkan oleh QSR Internasional salah yaitu NVivo. Pemakaian NVivo akan membantu para peneliti kualitatif dalam mengolah data sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif (Priyatni et al., 2020).

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan menggunakan pendekatan tematik yang juga dibantu dengan perangkat lunak *NVivo 12 Plus*. Aplikasi ini digunakan untuk menyusun *coding tree*, mengelompokkan tema hasil wawancara, dan melakukan *group query* untuk melihat keterkaitan antar topik dari berbagai sumber data. Dengan *NVivo*, peneliti dapat menelusuri frekuensi, konsistensi, dan hubungan antar kategori secara sistematis. Hasil visualisasi juga digunakan sebagai dasar untuk validasi data melalui triangulasi sumber. Dengan penggunaan perangkat lunak ini memungkinkan peneliti untuk mengelola, mengorganisir, dan menganalisis data non-numerik seperti transkrip wawancara, dokumen, catatan lapangan, dan data tekstual lainnya secara lebih efisien.

Penggunaan *NVivo* dalam penelitian ini berfokus pada proses coding untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola-pola berulang, dan hubungan antar kategori dalam

data hasil wawancara mendalam. Aplikasi ini memudahkan peneliti dalam menandai segmen-segmen penting dari data, mengelompokkan informasi berdasarkan topik atau isu tertentu, serta membandingkan persepsi antar partisipan.

Dengan fitur-fitur visualisasi seperti word cloud, tree map, dan matrix coding, NVivo juga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi keterkaitan antara tema-tema utama dan memberikan gambaran menyeluruh tentang dinamika kesenjangan kompetensi SDM TIK di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

Secara keseluruhan, penggunaan NVivo dalam penelitian ini diharapkan dapat memperkuat validitas hasil analisis data kualitatif dan memperkaya interpretasi temuan yang berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi, tantangan, dan peluang dalam pengembangan SDM TIK di sektor pemerintahan daerah.

3.7 Keabsahan Data

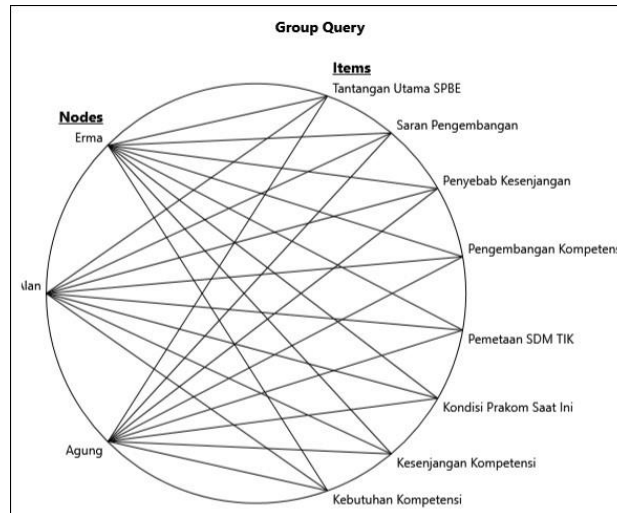
Dalam penelitian kualitatif keabsahan (validitas) dan etika penelitian sangat penting untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh akurat, dapat dipercaya, dan tidak merugikan partisipan. Keabsahan dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan sejauh mana temuan penelitian **mencerminkan realitas yang sebenarnya** dan tidak dipengaruhi oleh bias peneliti. Beberapa strategi yang digunakan untuk memastikan keabsahan dalam penelitian ini adalah:

- a. **Triangulasi Data:** Menggunakan berbagai sumber data (wawancara, observasi, dokumen) untuk memastikan validitas temuan.
- b. **Member Check:** Meminta partisipan untuk memverifikasi hasil wawancara dan temuan sementara agar sesuai dengan konteks yang dimaksud.

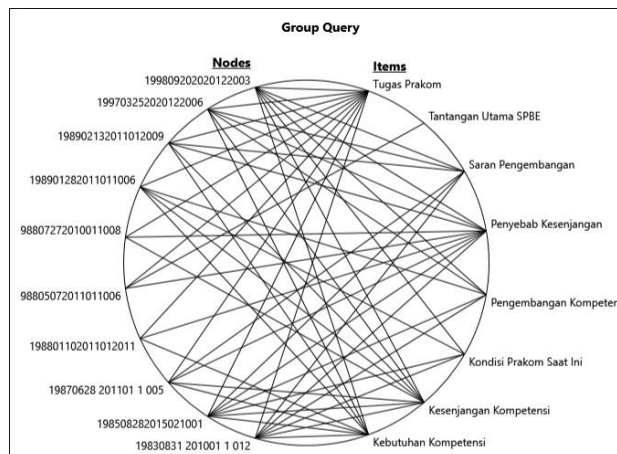
Untuk menjamin kualitas dan keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menerapkan **strategi triangulasi sumber** sebagai salah satu pendekatan validasi dalam studi kualitatif. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan memeriksa konsistensi informasi yang diperoleh dari **beragam informan pranata komputer** yang tersebar di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, termasuk Dinas Kominfo dan BKPSDM.

Dalam konteks penelitian ini, triangulasi dilakukan melalui analisis hasil wawancara mendalam terhadap sejumlah informan yang memiliki latar belakang jabatan fungsional yang sama (pranata komputer), namun berasal dari unit kerja dan beban tugas yang berbeda. Sebagai informan utama dari Dinas kominfo wawancara juga dilakukan pada beberapa sumber dari Bidang SPBE tapi memiliki tanggungjawab yang berbeda-beda terhadap pengelolaan SPBE.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak bantu *NVivo 12 Plus*.



Gambar 1: Triangulasi Sumber Informan Utama



Gambar 2: Triangulasi Sumber Informan Pendukung

Visualisasi hasil triangulasi sumber ditampilkan dalam bentuk diagram Group Query yang menggambarkan keterkaitan antara nodes (kode sumber informan) dengan items (tema atau topik hasil coding). Berdasarkan diagram tersebut, terlihat bahwa setiap tema utama, seperti *Tugas Prakom*, *Kesenjangan Kompetensi*, *Penyebab Kesenjangan*, dan *Pengembangan Kompetensi*, muncul pada lebih dari satu informan, bahkan sebagian besar tema dikonfirmasi oleh hampir seluruh sumber.

Hal ini menunjukkan bahwa:

1. **Informasi yang diperoleh tidak berdiri sendiri**, tetapi bersifat kolektif dan berulang antar informan.
2. **Setiap tema memiliki landasan empirik yang kuat**, karena didukung oleh data dari berbagai konteks OPD.
3. Peneliti berhasil **menghindari bias subjektif** karena tidak hanya mengandalkan satu jenis sumber atau satu sudut pandang saja.

Dengan pendekatan triangulasi sumber yang dikombinasikan dengan analisis tematik dan pemanfaatan perangkat lunak bantu, maka hasil penelitian ini memiliki tingkat **keabsahan dan kredibilitas** yang tinggi sesuai standar penelitian kualitatif.

Sedangkan etika penelitian berkaitan dengan bagaimana penelitian dilakukan secara etis, adil, dan tanpa merugikan partisipan. Pada penelitian ini dilakukan *informed consent* yaitu sebelum melakukan wawancara atau observasi dilakukan hal-hal berikut:

- a. Memberikan penjelasan tentang tujuan dan proses penelitian kepada partisipan.
- b. Meminta persetujuan partisipan secara tertulis melalui *informed consent*.
- c. Menjamin kerahasiaan identitas dan data partisipan serta menghormati hak partisipan untuk menghentikan partisipasi kapan saja.